

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

*THE EFFECT OF APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON
ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT IN REGIONAL FINANCIAL AGENCY AND
ASSETS IN MINAHASA SELATAN REGENCY*

Oleh:

Fitria N. Makalag¹

Jantje J. Tinangon²

Dhullo Afandi³

¹²³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹fitriamakalag064@student.unsrat.ac.id

²janjantinangon@gmail.com

³dhullo.afandi@unsrat.ac.id

Abstrak: Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan adalah penggunaan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Dengan uji ini dapat dilihat bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kabupaten Minahasa Selatan.

Kata Kunci: penerapan standar akuntansi pemerintahan, akuntabilitas pengelolaan keuangan

Abstract: One important aspect to improve the quality of state financial governance and government financial reporting is the use of government accounting standards. Accounting standards are needed to ensure consistency in financial reporting. Government accounting standards contain accounting principles that are applied in preparing and presenting financial statements in government organizations. This study aims to know the influence of the implementation of government accounting standards on financial management accountability in South Minahasa Regency. The research method using multiple linear regression analysis. With this test, it can be seen how the independent variables influence the dependent variable. The results of the study indicate that the implementation of government accounting standards affects the accountability of financial management in South Minahasa Regency.

Keywords: implementation of government accounting standards, financial management accountability

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah negara republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merujuk pada kesempatan dan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang wilayahnya berupa provinsi yang didalamnya ada daerah kabupaten dan Kota. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimiliki daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah. Dengan adanya hak dan kewenangan yang luas yang diberikan

untuk pemerintah daerah bukan berarti pemerintah daerah dapat menggunakan semua sumber-sumber kekayaan dan keuangan yang dimiliki daerah dengan semaunya tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Pada hakekatnya, pemberian hak dan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah merupakan suatu amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh pemerintah daerah untuk menciptakan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang baik dan memiliki hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan hak dan kewenangan yang diberikan diberikan secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Bab XI Pasal 280 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah” yang artinya pemerintah harus mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adapun pengertian Keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2005 Bab I Pasal 5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; yaitu, “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Berdasarkan uraian diatas, tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* sangat diperlukan sebagai suatu jalan untuk menciptakan pemerintahan yang demokrasi, transparansi, efektif, efisien dan akuntabel atau pemerintah yang memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam hal ini, *good governance* dimaksudkan bukan sebagai alat untuk mencari-cari kesalahan para oknum yang berbuat kesalahan atau penyimpangan dalam mengelola keuangan, melainkan dengan adanya penerapan *good governance* diharapkan pengelolaan keuangan akan dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keadilan dan manfaat untuk masyarakat. *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan bertujuan untuk menjamin penggunaan sumber-sumber keuangan agar tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan agar terwujudnya *good governance* pemerintah daerah yang nyata, dinamis dan akuntabel. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sangat diperlukan.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun dan disajikan berdasarkan SAP. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang diterapkan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar menjamin konsistensi dalam laporan keuangan pemerintah. SAP adalah syarat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum. Penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah menciptakan tantangan bagi para pengawas keuangan dalam mengungkap kewajaran pada penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan opini yang diberikan.

Penerapan kebijakan akuntansi yang baik oleh pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dan konsistensi. Laporan keuangan daerah harus disajikan dengan benar dan wajar berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu diperlukan Pengawasan yang optimal dalam kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan daerah agar isi dalam laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan digunakan oleh pemerintah daerah ataupun bagi masyarakat. Lewat penerapan kebijakan akuntansi yang baik dan pengawasan yang optimal oleh pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah akan berimplikasi pada minimnya penyimpangan atau penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga *good governance* dapat terwujud dalam pemerintahan Indonesia baik dalam tingkat pusat ataupun daerah. Oleh karena itu, Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Jamaluddin, Haliah, dan Kusumawati (2021:6), akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintahan, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pada akuntansi sektor publik, bidang pemeriksaan menjadi hal utama pada proses pencapaian akuntabilitas publik. Oleh karena itu, menurut Jamaluddin, Haliah, dan Kusumawati (2021:10), ada (tiga) jenis pemeriksaan dalam sektor publik yaitu :

1. Pemeriksaan keuangan
2. Pemeriksaan kinerja
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu pedoman atau prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam mengatur perlakuan akuntansi pada penyusunan laporan dan pelaporan keuangan pemerintah. Standar ini sangatlah penting karena jika standar akuntansi pemerintahan tidak memadai maka akan muncul banyak persoalan dalam penyajian informasi yang akan menyulitkan pengauditan. Menurut Fakhurrazi (2010), adapun keuntungan yang diperoleh dari standar akuntansi pemerintahan (SAP) yaitu :

1. Menghasilkan informasi laporan keuangan yang jujur, terbuka dan menyeluruh kepada para stakeholders (Eksekutif, Legislatif, Investor, Kreditor, dan Masyarakat).
2. Untuk lingkup manajemen dapat mempermudah fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas asset, serta kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menciptakan keseimbangan antar generasi yang memberikan kecukupan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang ada.
4. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaannya sehingga menciptakan kebijakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 terdapat beberapa indikator standar akuntansi pemerintahan yaitu :

1. PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. PSAP No.3 tentang Laporan Arus Kas (LAK);
4. PSAP No.4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
5. PSAP No.5 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP No.6 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP No.8 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP No.9 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP No.10 tentang Koreksi Kesalahan; dan
11. PSAP No.11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi.

Good Governance

Good Governance atau yang diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep dalam pemerintahan untuk memperkuat demokrasi yang ada dalam masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang diterapkan dalam pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Adapun beberapa prinsip *good governance* menurut United Nations Development Programme (1999), yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat
2. Tegaknya Supermasi Hukum
3. Transparansi
4. Peduli Pada *Stakeholders*
5. Berorientasi Pada Konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektivitas dan Efisiensi
8. Akuntabilitas

9. Visi Strategi

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2006 Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki yang dimiliki suatu daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri yang dapat dinilai secara moneter, termasuk berbagai bentuk kekayaan yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta tertib berdasarkan peraturan perundangundangan yang sah.

1. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Keterbukaan, artinya setiap proses yang berlangsung dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan hingga pelaksanaan APBD dilakukan secara terbuka atau transparan yang melibatkan semua pihak terkait.
- b. Akuntabilitas, artinya semua penerimaan dan pengeluaran anggaran yang diterima daerah wajib dilaporkan dan dipertanggung jawabkan secara transparan kepada publik dan DPR/DPRD.
- c. Partisipatif, merupakan kontribusi masyarakat secara langsung ataupun tidak dalam menilai, mengoreksi dan memberikan saran dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan.

2. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pajak daerah dan retribusi, serta memberikan pinjaman
- b. Pengeluaran daerah
- c. Pendapatan daerah
- d. Komitmen daerah untuk membayar hutang dan melakukan kegiatan pemerintah
- e. Semua asset daerah yang dapat dinilai dengan uang (komoditas, piutang, surat berharga, uang dan hak hak lain) termasuk dalam asset yang terpisah dari perusahaan pemerintah daerah atau pihak lain
- f. Asset pihak lain yang berada dibawah otoritas pemerintah daerah yang membantu pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah terbuka bagi publik.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara harafiah Akuntabilitas dalam bahasa inggris disebut *accountability* yang berarti “dapat dipertanggungjawabkan” sedangkan pengelolaan keuangan adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, peanggaran dan penggunaan, serta pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian diatas secara garis besar pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (perencanaan,peanggaran dan penggunaan, serta pengawasan) kepada masyarakat dan semua sektor-sektor publik atas hasil pengelolaan keuangan yang dilakukan. Menurut Mardiasmo (2018:28), terdapat 4 (empat) jenis indikator yang menjadi tolak ukur dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas dalam hal ini berkaitan dengan seluruh kebijakan pemerintahan yang harus dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat dan DPR/DPRD.
2. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas Program adalah suatu pertimbangan untuk melihat apakah pelaksanaan program telah dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal untuk dapat mencapai tujuan yang ada.
3. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
4. Akuntabilitas kejujuran mengacu pada bagaimana penghindaran kecurangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang ditetapkan.
5. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas Proses mengacu pada mekanisme dan prosedur yang akan digunakan dalam setiap tugas program yang akan dipertanggung jawabkan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Utama (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemerintahan standar akuntansi (SAP) dan penerapan keuangan daerah sistem informasi manajemen (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Denpasar. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder diperoleh dari responden yang bekerja pada Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Kota Denpasar. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 125 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 95 orang. Metode dari penentuan sampel dengan menggunakan metode proportional stratified random method. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan hasil bahwa penerapan standar

akuntansi pemerintahan memiliki a berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Denpasar yaitu Artinya semakin baik penerapannya maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya disajikan akan dapat memberikan informasi keuangan yang relevan dan andal. Pada di sisi lain, penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah Sistem Informasi (SIPKD) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Kota Denpasar, hal ini disebabkan teknologi yang belum termanfaatkan secara maksimal, yang kurang OPD dengan operator SIPKD yang mampu dan handal dalam menerapkannya sistem itu sendiri.

Karima, Maslichah, dan Sudaryanti (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dari Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Variabel Pemahaman Akuntansi dan Kepatuhan terhadap Hukum dan Variabel peraturan secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Penelitian Ramdani dan Agustina (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebanyak 70 sampel dengan teknik purposive sampling. Metode yang digunakan untuk menganalisis variabel bebas dengan variabel terikat adalah metode regresi linier sederhana dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian secara parsial, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber : Kajian Teoritik, Data Diolah (2023)

Hipotesis

Diduga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Kabupaten Minahasa Selatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. metode kuantitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan pendekatan korelasi (*correlational research*). Penelitian korelasi bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan antar dua variable atau lebih. Apabila kedua variabel yang diteliti saling berhubungan maka seberapa berpengaruh hubungan itu.

Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi pada penelitian ini adalah kepala bidang dan sub bidang di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan, dan bidang aset pada badan keuangan dan aset daerah kabupaten Minahasa Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus atau *total sampling* jenuh, dimana jumlah sampelnya sama dengan jumlah populasi, maka sampel dalam penelitian ini adalah kepala bidang dan sub bidang di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan, bidang aset pada badan pengelolaan keuangan, dan aset daerah Kabupaten Minahasa Selatan, yang berjumlah 33 orang.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner yang dibagikan secara tertutup

kepada responden. Kuesioner dapat berupa pernyataan-pernyataan terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung.

Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian

Tabel 1. Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Pengertian	Indikator
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)	Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. PSAP No 01 tentang penyajian laporan Keuangan 2. PSAP No 02 tentang LRA 3. PSAP No 03 tentang LAK 4. PSAP No 04 tentang CaLK 5. PSAP No 05 tentang akuntansi persediaan 6. PSAP No 06 tentang akuntansi investasi 7. PSAP No 07 tentang akuntansi aset tetap 8. PSAP No 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan 9. PSAP No 09 tentang akuntansi kewajiban 10. PSAP No 10 tentang koreksi kesalahan 10. PSAP No 11 tentang laporan keuangan Konsolidasi (PP Nomor 71 Tahun 2010)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	Kewajiban dari pelaku-pelaku yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial, dan program daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kebijakan 2. Akuntabilitas program 3. Akuntabilitas hokum dan kejujuran 4. Akuntabilitas proses (Mardiasmo, 2018:28)

Sumber : Data Olahan, (2022)

Teknik Analisis Pengujian Instrumen Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika item pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antar masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi *bivariate* dengan melihat output *pearson correlation* (Ghozali, 2018).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau kosntruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir angket atau kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *Cronbach's Alfa* $\geq 0,6$ dan dikatakan tidak reliabel jika *Cronbach's Alfa* $< 0,6$. (Ghozali, 2018:47).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:160), uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Data pengambilan keputusan normalitas data yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi normalitas, sedangkan jika data menyebar lebih jauh dan tidak mengikuti arah garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018:139), uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Analisis Regresi Tunggal

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi tunggal. Model ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menggunakan analisis regresi tunggal yang diolah melalui program SPSS Versi 22, maka besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan akan dapat diketahui. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Menurut Sugiyono (2019:270) bahwa regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen, persamaan analisis regresinya adalah :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

- Y = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
- a = Bilangan konstan
- b = Koefisien arah regresi
- X = Akuntansi pengelolaan keuangan
- e = Standar error

Uji Hipotesis

Uji t

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS Versi 22, maka dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Pembuktian hipotesis yang diajukan dapat menggunakan uji statistik, yaitu uji t. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (partial) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen (Ghozali, 2018). Untuk membuktikan hipotesis penelitian digunakan uji t, yaitu untuk menguji keberartian koefisien regresi dengan hipotesis statistik :

- $H_0 : X = 0$
Artinya, Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kabupaten Minahasa Selatan.
- $H_a : X \neq 0$
Artinya, Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengujian dilakukan dengan uji t dengan membandingkan thitung (t_h) dengan ttabel (t_t) pada $\alpha = 0,05$;

1. Jika $t_h \geq t_t$, maka H_0 ditolak, H_a diterima; atau jika $\text{Sig.} \leq 0,05$

Artinya:

- a. Variabel bebas dapat menerangkan variable tidak bebas, dan
- b. Ada hubungan diantara dua variabel yang diuji.

2. Jika $t_h < t_t$, maka H_0 diterima, H_a ditolak; atau jika $\text{Sig.} > 0,05$

Artinya:

- a. Variabel tidak dapat menerangkan variable tidak bebasnya, dan
- b. Tidak ada hubungan diantara dua variabel yang diuji.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sarwono, 2017:205). Pada penelitian ini untuk menunjukkan seberapa besar presentase yang ditimbulkan oleh variabel bebas. Dengan bantuan aplikasi SPSS versi 22, koefisien determinasi melalui tabel model *summary* dengan melihat kolom *R Square*. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen (Ghozali, 2018:46).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

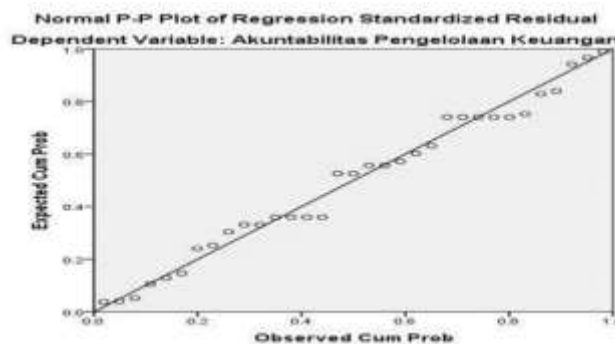
Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Nilai signifikan untuk setiap pernyataan adalah $< \alpha$ yaitu 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dikatakan valid. Nilai *Cronbach Alpha* untuk item pernyataan $> 0,6$ maka dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi berdistribusi normal/tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



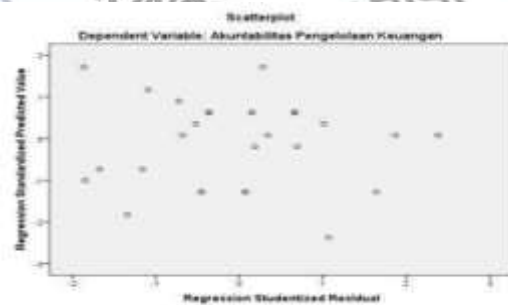
Gambar 2. Normal Probability Plot

Sumber: Data Olahan, 2022

Gambar 2 memperlihatkan bahwa tidak terdapat masalah pada uji normalitas karena berdasarkan grafik di atas terlihat titik-titik koordinat antara nilai observasi dengan data mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari residual tidak sama untuk semua pengamatan, yang menyebabkan estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi. Jika dari suatu pengamatan tersebut terdapat varian yang berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Scatterplot

Sumber: Data Olahan (2022)

Gambar 3 memperlihatkan bahwa pengujian heteroskedastisitas menampakkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas terbentuk serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengidentifikasi tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga data layak digunakan.

Analisis Regresi Linear Tunggal

Berdasarkan data Tabel 2 dapatlah dibuat rumusan persamaan regresinya $Y = 6,425 + 0,692 X + e$, Koefisien korelasi dengan nilai positif menunjukkan adanya arah pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah positif. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sebaliknya, semakin rendah penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin rendah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kabupaten Minahasa Selatan dapat diterima.

Tabel 2. Analisis Regresi Linear Tunggal

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	6.425	4.689		1.370	.180
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.692	.096	.791	7.207	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Sumber: Data Olahan, (2022)

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji t

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	6.425	4.689		1.370	.180
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.692	.096	.791	7.207	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Sumber: Data Olahan, (2022)

Tabel 3 memperlihatkan bahwa motivasi memiliki tingkat signifikansi (Sig) = 0,000 < 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat diterima atau terbukti.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.791 ^a	.626	.614	1.99326

a. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sumber : Data Olahan, (2022)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai koefisien korelasi berganda yang dihasilkan pada model 1 adalah sebesar 0.791 artinya mempunyai cukup kuat. Nilai koefisien determinasi adalah 0,626 atau 62,6%. Artinya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah sebesar 62,6% dan sisanya sebesar 37,4% di pengaruhi variabel

lain.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Artinya PSAP sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan sudah berjalan dengan dan sudah menerapkan basis akrual, antara lain; penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerimaan pembiayaan telah diakui saat diterima di rekening kas, Telah menyusun laporan arus kas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi, telah membuat catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, pencatatan persediaan telah dilakukan berdasarkan investasi fisik, telah mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan dinilai investasi dapat diukur, telah mengklasifikasikan asset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas. Selain itu juga, Kabupaten Minahasa Selatan telah mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, serta telah mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dan telah melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan, dan telah menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramdani dan Agustina (2020) yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa PSAP sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010B tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan sudah berjalan dengan baik dan sudah menerapkan basis akrual.

Saran

Saran untuk implikasi dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Kabupaten Minahasa Selatan lebih meningkatkan lagi item/ Pernyataan pada indikator penerapan standar akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi investasi. akuntansi investasi merupakan indikator yang memiliki tanggapan atau persepsi yang lemah pada indikator penerapan standar akuntansi pemerintahan, misalnya mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan tambahan variabel independen lainnya yang berhubungan dengan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrurazi. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. <http://fakhrurazy.wordpress.com>. Diakses pada 8 Juni 2022
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jamaluddin, J., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2022). Efektivitas Dan Efisiensi Implementasi Balance Scorecard Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Sudy Literatur). *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 1(2), 59–66. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jakob/article/download/3833/2577>. Diakses pada 20 Juni 2022.
- Karima, D., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(6), 10-24. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/10682/8416>. Diakses pada 23 Juni 2022

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Krual Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Ramdani, E., & Agustina, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*. Vol. 5, No. 1, 1-10. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+penerapan+standar+akuntansi+pemerintah+berbasis+akrual+terhadap+akuntabilitas+laporan+keuangan+pemerintah+daerah+Kabupaten+Aceh+Utara&btnG=#d=gs_qabs&t=1678247876788&u=%23p%3DG_fwTx6ksxMJ. Diakses pada 15 Juli 2022.

Sarwono, J. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

United Nations Development Programme. (1999). Decentralization: A Sampling of Definitions, Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance. *Working Paper*. http://web.undp.org/evaluation/documents/decentralization_working_report.pdf. Diakses pada 16 Juli 2022.

Utama, I. K. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kota Denpasar. *HITA Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2, No. 1, 492-513. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1577/948>. Diakses pada 10 April 2022.

